

# REINVENTING POLITIK NU: STERILISASI DI TENGAH FRAGMENTASI



**Firdaus Muhammad**  
Alumni Pesantren An-Nahdliyah,  
Dosen UIN Alauddin Makassar

**P**roblematika internal NU yang cukup menyita perhatian adalah pada persoalan politik, utamanya keterlibatan sejumlah kiai dalam kancah politik praktis. Akibatnya, terjadi fragmentasi antara kiai yang berimbas pada perilaku politik santri dan warga Nahdliyin. Dan, pada kenyataannya sejumlah kiai yang terjun dalam politik praktis, baik melalui Pilkada maupun Pilpres mengalami kekalahan.

Maka salah satu tawaran untuk diagen-  
dakan dalam Mukhtamar NU Ke-32 di Ma-  
kassar adalah menata politik. Setidaknya  
melakukan sterilisasi guna meminimalisir

arus fragmentasi yang justru 'melum-  
puhkan' NU. Perlu proses *reinventing*  
politik NU, yakni mencari identitas dan  
formulasi politik, bagaimana menatanya,  
menjabarkan *take and give* bagi NU dan bu-  
kan mengabaikannya. Sebab, jika NU se-  
penuhnya menanggalkan politik justru ha-  
nya akan menjadi 'pasar' yang diperebut-  
kan politisi untuk mendapatkan  
keuntungan.

Mekanisme politik NU harus ditata  
agar tidak terjadi pembiaran, mengingat  
NU sebagai pasar suara. NU harus  
diselamatkan dan disatukan, jika tidak  
ditata justru akan dimanfaatkan orang  
lain yang justru kemungkinan merusak  
NU, sebab hanya orang NU yang ikhlas  
membesarkan NU. Karena itu, NU harus  
punya mekanisme dan rumusan konsep  
berupa *manhaj siyasi* yang mengatur relasi  
NU dengan politik praktis. NU harus dise-  
lamatkan agar tidak terseret menjadi  
korban politik yang menyuplai suara NU  
belaka, tapi tidak memberi manfaat dan  
kemaslahatan bagi Nahdliyin. Aspek lain  
yang meniscayakan penataan mekanisme  
politik itu, sebab selama reformasi ter-  
nyata NU hanya didera fragmentasi dan  
turbulensi politik yang tidak terkendalkan

<sup>1</sup> Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 182

karena tidak adanya mekanisme yang mengatur, NU dirugikan. Tampaknya dinamika konflik internal berkepanjangan menjadi keunikan NU, apalagi konflik itu muncul dari kalangan elit.<sup>1</sup>

Berbicara politik dalam NU acapkali mengalami dilema. Jika tidak ditangani, suara Nahdliyin terbelah. Tapi sebaliknya jika terlalu diperhatikan atau diatur justru tampak adanya perebutan antarelit sendiri. Hal ini tampak ketika keterlibatan sejumlah tokoh NU berkibrah dalam kancah politik praktis.

Pengalaman politik NU pasca Orde Baru, sejak Pilres 1999, yang mengantarkan Gus Dur menjadi presiden RI keempat, NU larut dalam euforia politik. Kemudian pada Pilpres 2004, Kiai Hasyim Muzadi tampil menjadi Cawapres mendampingi Megawati. Demikian halnya pada Pilpres 2009, Jusuf Kalla (JK) seorang tokoh NU maju menjadi capres.

Pengalaman politik dalam tiga pilpres tersebut, secara langsung atau tidak telah melibatkan NU sehingga energi NU lebih terkonsentrasi pada politik praktis. Akibatnya, agenda besar NU terbengkalai. Selain itu, PKB yang dilahirkan PBNU selalu didera konflik internal berkepanjangan yang membawa petaka politik Nahdliyin. Klimaksnya, ketika Gus Dur dieliminir kadernya, Muhaimin Iskandar, dari panggung politik. Realitas politik lain, sejumlah tokoh NU yang juga melibatkan jami'iyah melalui pencalonannya sebagai anggota legislatif, bupati bahkan gubernur dalam ajang Pilkada. Semuanya, (selalu) mengantarkan NU mengalami disorientasi politik.



Demikian warna-warni politik NU yang kelak meniscayakan adanya sterilisasi melalui penataan mekanisme. Hal ini guna menetralkan NU dari arus fragmentasi dan turbulensi yang selama ini mewarnai politik NU. Maka ke depan, mekanisme politik NU diniscayakan ditata, misalnya, pasar suara NU dikelola melalui mekanisme marketing politik. Pendekatannya melalui marketing transaksional dan relasional.<sup>2</sup> Hal ini bukanlah politisasi NU, tapi menjaga gawang politik NU agar tidak menjadi pembiaran.

Menilik sejarah perpolitikan NU memasuki fase baru sejak reformasi 1998, inilah titik tolak euforia politik NU pasca kembali pada Khittah 1926. Sejumlah partai berbasis NU didirikan dan dipelopori kiai-kiai, sehingga melahirkan eskalasi ke arah politik pragmatis. Alasan membentuk partai politik berbasis NU agar aspirasi politik Nahdliyin dapat tersalurkan melalui partai yang didirikan elit NU. Tapi kemudian, ditengarai justru menjadi alat mencapai tujuan politiknya

<sup>1</sup> <sup>2</sup> Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: YOI, 2008), hlm. 139

untuk meraih kekuasaan. Euforia politik Nahdliyin kemudian mencapai puncaknya ketika Guru Gus Dur terpilih menjadi presiden RI ke-4 tahun 1999. Guru Gus Dur “ditahbiskan” sebagai tokoh terbaik NU menjadi pemimpin negara dan bangsa, sebelumnya menjadi oposisi. NU kemudian dipertaruhkan di pundak Gus Dur. Pada akhirnya, NU harus menelan pil pahit politik ketika Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan tahun 2001.

Meski demikian, pil pahit politik sedikit pun tidak membuat sejumlah tokoh NU trauma. Sebaliknya, mereka justru semakin aktif menempuh jalur politik dengan caranya masing-masing. Mengamati keterlibatan sejumlah tokoh NU dalam kancah politik praktis itu, dalam amatan penulis, justru menjadi resistensi bagi NU. NU sebagai organisasi terbesar Islam tereduksi dan mengalami disorientasi.

Padahal NU seharusnya mengambil peran untuk mengawal reformasi untuk upaya perbaikan bangsa ini. Tapi kenyataannya, NU justru ikut terlibat dalam pergulatan politik praktis yang menjadikan nasib NU sendiri menjadi memprihatinkan. Sebab kemudian hanya menyuburkan konflik internal NU. Akibat lain, misi sosial NU untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan warganya menjadi terbengkalai.

Keterlibatan NU dalam politik praktis di awal reformasi sangat tidak tepat, karena justru mengambil peran sangat kecil dengan mendirikan partai. Sementara peran penyelamatan bangsa terabaikan. Keterlibatan tokoh NU dalam politik tidaklah menjadi stigma yang harus dialamatkan pada seluruh tokoh NU. Sejumlah kiai menjadi perkecualian, sebut saja Kiai Sahal

Mahfudh dan Kiai Mustafa Bisri, tergolong ikon yang steril dari politik praktis dan tetap memainkan perannya sebagai penyeru moralitas politik.

Partisipasi politik Nahdliyin sangat dipengaruhi dari konstruk politik NU dengan harapan dapat menyalurkan aspirasi politiknya, sehingga mendapatkan hak-hak politiknya sebagaimana layaknya warga negara lainnya. Respons kaum Nahdliyin terhadap politik mencerminkan artikulasi yang mengalami perubahan, dari kondisi ‘netral’ pada era Orde Baru menjadi lebih pro-aktif terlibat dalam partai politik. Perubahan perilaku politik NU itu, semata karena intensitas politik elit NU seiring terjadinya perubahan sistem politik nasional yang memberi ruang kebebasan berpolitik bagi setiap warga negara.

Kondisi dan peluang tersebut melibatkan elit NU untuk secara aktif terjun ke dunia politik praktis. Keterlibatan elit itu pula yang mengharuskan mereka secara intens membangun komunikasi politik untuk memuluskan cita-cita politiknya dalam meraih kekuasaan. Tapi sesungguhnya, aktivitas politik mereka terkadang melibatkan institusi NU dalam berebut pengaruh pada warga NU untuk memberi dukungan politik. Implikasinya, terjadi penyimpangan tokoh NU terhadap misi politik institusi NU sebagai organisasi sosial keagamaan, tidak terlibat politik praktis melainkan politik moral kebangsaan yang memiliki kepedulian terhadap kemaslahatan bangsa, seperti mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, *good governance* dan penguatan *civil society*, menjaga eksistensi pancasila dan UUD 1945 serta keutuhan NKRI.

Perubahan perilaku politik elit NU dan

partisipasi politik Nahdliyin pasca Orde Baru, tentu dipengaruhi perubahan sistem dan perilaku elit politik nasional pasca Orde Baru. Hal mana juga mempengaruhi partisipasi politik kaum nahdliyin, adakalanya larut dalam eforia politik, radikalisme atau kekerasan politik *vis a vis* elit politik nasional di partai dan parlemen serta terjebak dalam fragmentasi dan konflik intern.

Perubahan drastis juga terjadi di *grass root* NU. Corak politik Nahdliyin yang ditengarai *emotional choice* beralih menjadi *rational choice*. Mereka tetap patuh pada kiai dalam bidang agama tetapi tidak demikian halnya dalam bidang politik. Kaum Nahdliyin memilih figur yang mampu membawa aspirasinya sehingga sejumlah tokoh NU terpental dalam Pilkada. Bahkan kiai dianggap tidak tepat bergulat dalam kancah politik, belum lagi stigma politik itu kotor, masih mewabah di kalangan masyarakat tertentu. Dalam perspektif Allan G. Johnson yang menegaskan bahwa sistem sosial dalam struktur organisasi sebagai alternatif menguatnya pengaruh individu.<sup>3</sup> Jika perspektif ini diadopsi, maka tampaknya rasionalitas Nahdliyin dalam menentukan pilihan politiknya masih terbatas pada dominasi elitnya. Hanya saja, tokoh NU dengan personifikasinya berpengaruh di altar

agama, tapi tidak dalam politik.

### Tradisi (baru) Politik NU

Otoritas kiai ternyata hanya berpengaruh kuat dalam bidang keagamaan dan tidak demikian halnya dalam hal politik.<sup>4</sup> Tampaknya ini menjadi tradisi baru politik NU ketika warga NU mulai *melek* politik. Justru keterlibatan tokoh NU dalam kancah politik praktis Pasca Orde Baru, mereduksi kekuatan NU yang bermuara pada fragmentasi, puncaknya melahirkan turbulensi politik dan konflik internal berkepanjangan, nyata tampak dalam konflik internal PKB pasca Guru Gus Dur.

Fenomena keterlibatan sejumlah tokoh NU berpolitik langsung melalui partai politik tertentu, patut dijadikan titik balik politik NU karena multitafsir Khittah 1926 dan realitas politik pasca Orde Baru, menjebak tokoh NU secara personal terjun ke kubangan politik praktis dengan mempertaruhkan otoritasnya. Dalam prosesnya, mereka lebih memilih mengadu tawar dengan penguasa atau elit tertentu yang memiliki legitimasi kekuasaan. Dari perspektif penguasa, kekuasaan kiai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan sosial-politik warga NU. Hal ini karena para kiai adalah pemegang legitimasi keagamaan. Legitimasi kiai ini oleh pemeritah atau para

<sup>3</sup> Lihat Stephen W. Littlejohn, *Theoris of Human Communication* (sevent edition), (New Mexico, 2002) dan David Crowley dan David Mitchell, (ed), *Communication Theory Today*, (Oxford, 1998) dan Allan G. Johnson, *The Blackwell Dictionary of Sociology: A User's Guide to Sociological Language*, (First Publish, USA, 1995), hlm. 225.

<sup>4</sup> Firdaus Muhammad, *Komunikasi Politik Elite NU Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

<sup>5</sup> Endang Turmudi yakin, perselingkuhan kiai dengan penguasa tak akan menghilangkan peran dan otoritas kiai secara keseluruhan. Kiai sebagai penjaga moral dan nilai-nilai masih relevan dan berjangka panjang. Sebab, pada dasarnya kiai dapat dikategorikan menjadi kiai pesantren, kiai tarekat, dan kiai yang terlibat dalam politik. Jenis kiai yang terakhir inilah sebenarnya yang rawan berselingkuh dengan penguasa. Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 264.

elit politik dapat digunakan untuk mele-galkan tindakan-tindakan duniawi mereka.<sup>5</sup>

Tindakan politik seperti itu meski lebih personal, tetapi sepertinya telah menjadi kultur politik NU yang bercorak fleksibel. Implikasinya dalam masalah politik, NU kadang sulit membendung arus stigmatisasi oportunistis sebagai konsekuensi paradigma politiknya yang fleksibel tadi. Implikasinya kemudian, warna politik NU menjadi beragam sehingga melahirkan pertentangan dan konflik individual sebab masing-masing elit memiliki otoritas, meski sifatnya terbatas dan temporal. Pengelompokan yang mengemuka interen NU pasca Orde Baru. Misalnya, kubu Kiai Abdurrahman Wahid dengan kubu Kiai Hasyim Muzadi atau kubu Kiai Abdurrahman Wahid dengan kiai khos. Perbedaan melalui pengelompokan tersebut melahirkan sikap politik pragmatis dan perbedaan menafsirkan makna khittah NU 1926, bahkan perbedaan dalam penghayatan nilai-nilai ajaran Aswaja.<sup>6</sup>

Dalam implementasinya doktrin politik NU yang berpijak pada kaidah fiqih, mempengaruhi ulama NU dalam menjalankan kebijakan politiknya. Sedangkan prinsip yang dianut dari tiap pengambilan keputusan oleh NU adalah terdiri dari tiga kategori utama, yaitu kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme.

Implementasinya, misalnya, anjuran untuk menghindari bahaya sering dikaitkan dengan konsep *al-maslahatul 'ammah* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Al-maslahatul 'ammah* berkaitan dengan konsep lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat, lebih mengutamakan manfaat yang dapat dicapai.

Dalam hal politik, misalnya, NU berusaha menempatkan dirinya sebagai penengah dari pihak-pihak yang berkonflik (*al-khuruju minal khilaf*). Dengan pihak yang memusuhi NU sendiri, NU mencoba menyelesaikan dengan mengambil tindakan yang disebut 'moderatisme' ini. Pengaruh gerakan dan pemikiran NU yang akomodatif dan kompromistis tersebut, berpengaruh dalam perjalanan politik NU selanjutnya. Implikasi penting peranan gerakan dan pemikiran NU ini membuat NU menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik Indonesia yang di mata orang lain cenderung 'kontroversial', 'polemis', dan 'akomodatif', terutama ketika NU memberikan *treatment* terhadap kekuasaan. Salah satu ciri melekat dari pendekatan yang *fiqih oriented*. Yakni bahwa paradigma keagamaan NU selalu dikalkulasikan atas pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek *mashlahah* dan *mafsadah*.

Pemikiran dan komunikasi politik NU juga dipengaruhi oleh para pemikir yang

<sup>6</sup> Paradigma politik NU berpijak pada ajaran politik sunni. Rujukan dan doktrin politik tersebut, sangat berpengaruh terhadap aksi sosial, partisipasi dan adaptasi politik elite dan warga NU. Perubahan komunikasi dan perilaku politik elite NU pasca Orde Baru ditengarai sebagai wujud politik partisipatoris, akomodatif dan adaptif dalam menentukan sikap politiknya. Meskipun corak politik NU pasca Orde Baru tidak dapat digeneralisir dengan aksi politik yang adaptif, tetapi juga radikal dan brutal. Perilaku politik NU yang mengedepankan emosi tampak saat menjelang dan saat KH. Abdurrahman Wahid dilengserkan dari kursi kepresidenan tahun 2001. Ali Anwar, "Avonturisme" NU: Menjejak Akar Konflik Kepentingan-Politik Kaum Nahdliyyin, (Bandung: Humaniora, 2005), hlm. 185

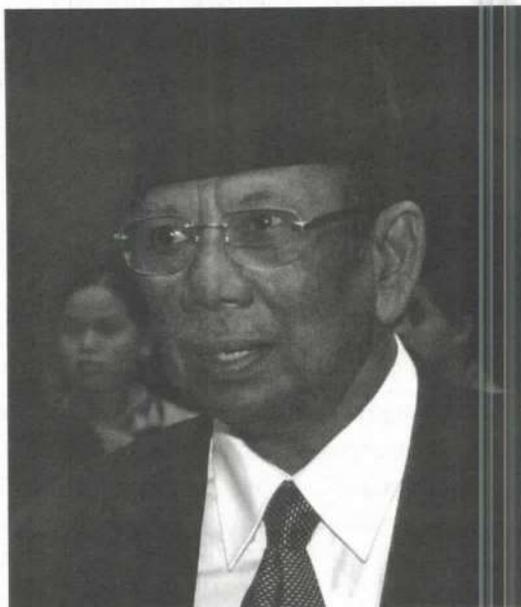
menjadi pengikut mazhab Syafi'i lainnya, seperti al-Mawardi, Al-Ghazali, dll. Fiqih politik yang menjadi doktrin kalangan muslim tradisional ini pada gilirannya banyak mempengaruhi sikap dan komunikasi politik NU.

Meskipun demikian, sebagai produk ijtihad, fiqih sendiri tetap terbuka terhadap perubahan-perubahan. Dalam analisis M. Ali Haidar, 'fiqihisme' sebagai ideologi sosial dan politik tidaklah kaku. Kaidah-kaidah fiqih itu fleksibel dalam menentukan sikap dan perilaku dalam suasana sosial dan politik yang berubah, karena fleksibilitas kaidah yang dianutnya itu, NU seringkali melahirkan perilaku yang dikesankan banyak kalangan sebagai tindakan yang inkonsisten<sup>7</sup>

#### (Dis)orientasi Politik NU

Salah satu faktor yang mempengaruhi NU komunikasi politik NU adalah faktor setting konstelasi politik nasional. Konstelasi perpolitikan di tanah air mengharuskan NU terlibat untuk memainkan perannya. Sejak bergulirnya era reformasi, NU berupaya mengambil peran untuk mengawal reformasi. Salah satunya dengan mendirikan partai politik, meskipun langkah tersebut dinilai keliru, sebab NU sebagai organisasi sosial keagamaan mengecilkan perannya. Ironisnya, sikap tersebut justru mengundang konflik internal antarelit NU dalam kubangan disorientasi. Tanpa tujuan yang jelas, visinya bias.

Padaحال NU sejatinya memiliki orientasi politik kongkrit dengan mengambil



peran untuk menyelamatkan bangsa yang terjebak dalam multi krisis. Perubahan orientasi politik elit NU, juga menyeretnya, dari "gerakan sosial keagamaan" bergeser ke "orientasi politik kekuasaan".<sup>8</sup>

Hal tersebut tampak ketika PBNU turut membidani kelahiran PKB. PBNU tampak kurang berhasil mengawal khittahnya, sebab jajaran struktural terlibat jauh dalam politik praktis.

Maka, dalam membendung arus politisasi NU di tengah perubahan politik nasional tersebut, NU melalui sayap syuriah pun mengambil peran dalam menjaga khittah. Melalui kontrak yang dikeluarkan Kiai Sahal Mahfudh pasca Muktamar NU ke-31 untuk mengontrol langkah sayap tanfidziyah yang dinakhodai Kiai Hasyim Muzadi. Gayung bersambut, Kiai Hasyim belakangan juga

<sup>7</sup> Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 1992).

<sup>8</sup> Lihat, komentar Robert W Hefner (1999) ketika mengantarkan buku *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

gencar menyuarakan untuk mensterilkan NU dalam politik praktis. Tapi menjadi mitra yang tetap mengontrol jalannya pemerintahan, NU bukan oposisi.

Kontrak jamiyah yang menjadi tradisi baru dalam muktamar NU. *Pertama*, ketua umum tanfidziyah akan taat sepenuhnya kepada AD/ART NU, khittah NU, rois aam dan keputusan syuri'ah. *Kedua*, Ketua Umum PBNU berusaha sekuat tenaga melaksanakan hasil-hasil Mukhtar NU ke-31 di Boyolali. *Ketiga*, Ketua Umum PBNU tidak akan secara langsung mengatasnamakan NU, kecuali bersama rois aam dan berdasarkan keputusan rapat PBNU. *Keempat*, Ketua Umum PBNU tidak akan terlibat dalam kegiatan politik praktis apapun.

*Kelima*, Ketua Umum PBNU tidak akan mencalonkan diri untuk jabatan politik praktis, baik legislatif maupun eksekutif. Tampaknya, kontrak jam'iyah itu langsung diamini Kiai Hasyim Muzadi dan menegaskan bahwa mulai sekarang, pasca Mukhtar NU ke-31 Boyolali, tidak boleh lagi pengurus harian PBNU terlibat politik praktis, baik di legislatif maupun eksekutif. Tentu, komitmen tersebut akan diuji seiring derasnya arus konspirasi politik masa mendatang.<sup>9</sup>

Sementara dunia politik adalah dunia yang justru penuh dengan kompromi, konflik, rasionalisasi, dan manipulasi

terutama untuk kepentingan pencapaian tujuan politik: kekuasaan. Persoalannya adalah, karena sentimen primordial, biasanya tertanam kuat dalam kesadaran seseorang. Dan karena itu, sering mengalahkan kalkulasi-kalkulasi politik rasional lainnya.<sup>10</sup>

Kondisi politik nasional seperti menjelang dan saat Pemilu, NU menjadi 'pasar' yang dibidik para elit politik sebagai basis massa potensial untuk mendulang suara sebagai pijakan meraih kekuasaan. Dalam konteks ini, NU cenderung diperalat atau sekadar dimanfaatkan para elit politik non NU dengan melakukan kunjungan pada basis-basis NU. Sementara NU sendiri tidak mendapatkan keuntungan, kecuali personal yang menggadaikan NU dengan elit politik bahkan kepada penguasa.

Menyadari kondisi tersebut, sejumlah elit NU mengajukan alternatif untuk memainkan peran politik NU dengan melibatkan diri dalam kancah politik praktis. Pilihan sejumlah elit NU untuk berpolitik bukan tanpa resiko terhadap NU sendiri. Di sinilah titik dilematis peran politik NU. Jika tidak terlibat secara praktis maka akan dimanfaatkan orang lain. Tapi jika elit NU terlibat politik praktis maka akan menjadikan NU stagnan dengan terabaikannya program-program untuk kemaslahatan Nahdliyin.

<sup>9</sup> Uraian seputar masalah ini terdeteksi dalam kajian Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 333-350.

<sup>10</sup> Saiful Mujani, *Partai Agama, Sebuah Penjelajahan Global dalam Harian Umum Republika*, edisi 27 juli 1998, Lebih jauh Saiful Mujani mengulas agak mendalam beberapa pengalaman politik di negara-negara muslim lainnya di dunia. Kasus-kasus Aljazair, Turki, Mesir, Pakistan, dan Sudan merupakan representasi yang diangkat berkenaan dengan persoalan partai-partai agama. Lihat juga, Saeful Mujani, *Kekalahan Partai Islam*, dalam, Hamid Basyaib (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah?*, (Jakarta: Alfabeta, 1999), hlm. 195.

Menyikapi dilema politik tersebut, jajaran NU struktural kemudian mengembangkan konsep politik kebangsaan. NU diharuskan berpolitik dalam konteks kepentingan bangsa-negara. Politik moral kebangsaan NU diimplementasikan dengan melakukan seruan-seruan moral, termasuk upaya NU dalam menyuarkan pemberantasan korupsi. Namun internal NU juga lahir personal yang memiliki kecenderungan politik tinggi untuk terlibat secara langsung. Sementara NU sebagai menyatakan diri mengambil jarak dengan kekuasaan.

Kemampuan NU mengambil jarak dengan kekuasaan menjadi keniscayaan sekaligus amanat khittah NU sendiri yang membatasi ruang pragmatis politik NU. Keterlibatan NU dalam politik praktis akan membawa implikasi ke arah stagnan. Menurut Laode Ida, keterlibatan elit NU dalam politik praktis akan berimplikasi pada tiga masalah utama.

*Pertama*, keterlibatan NU dalam politik menjadikan pengembangan sumber daya manusia melalui pesantren dan basis NU lainnya menjadi stagnan. *Kedua*, pemeranan fungsi kendali NU di tangani politisi sehingga menimbulkan penyimpangan institusi NU. *Ketiga*, adanya kesadaran bahwa hak-hak politik warga NU telah dieksploitasi oleh para elitnya.<sup>11</sup>

### Fragmentasi di Altar Turbulensi Politik NU

Fragmentasi politik elit NU tersebut berhasil menyeret NU sebagai jam'iyah

ke arena politik terlalu jauh. Pada pilpres 1999, 2004 dan 2009 terpaksa NU mempertaruhkan posisinya yang kelak mempertajam polarisasi di kalangan NU. Polarisasi itu dalam real politik akan membawa dua dampak.

*Pertama*, perpecahan antarelit kiai. Pada level ini, pola hubungan antarkiai telah menjelma menjadi 'solidaritas organik' dengan logika perebutan pengaruh demi afiliasi politiknya. *Kedua*, pembangkangan santri. Fenomena ini bukan hanya terjadi pasca proyek besar-besaran liberalisasi pemikiran anak muda NU, yang menyebabkan runtuhnya patriarkisme kiai. 'Pembangkangan' santri terhadap kiai juga sudah dimulai dan bahkan diciptakan oleh kiai sendiri melalui kaidah fiqih yang dinamis itu.<sup>12</sup>

NU yang berkuat dalam kancan religiopolitik NU, menunjukkan fakta bahwa NU sebagai *jami'iyah diniyyah* dengan basis massa yang riil sulit menarik garis demarkasi antara tujuan jam'iyah dengan kepentingan politik sesaat. Untuk itu, sejatinya NU dapat belajar dari pengalaman tersebut. Tapi tampaknya, *politic is the art of possibility* dan NU merupakan ormas raksasa yang tidak jera berpolitik dan terbukti mempunyai potensi politis besar.

Kegagalan elit NU mencapai tujuan politiknya akibat meningginya fragmentasi antar-elit itu sendiri yang mempengaruhi warga NU terlibat faksi-faksi politik. Fanatisme warga, yang terbentuk oleh apa yang disebut Donald E Smith (1970) sebagai sistem politik tradisional berdasarkan

<sup>11</sup> Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 69-72

<sup>12</sup> Lihat Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*.

<sup>13</sup> Mujamil Qomar, *NU Liberal*, (Bandung: Mizan, 2002).



keagamaan, telah membuat NU bergelombang sejarah politik praktis. Yang perlu diingat, cerita politik NU yang sering tidak *happy ending* dan cenderung 'dilukai'.<sup>13</sup>

Berangkat dari 'sakit hati' serta keinginan reorientasi organisasi, NU cerai dari politik praktis dengan menggelorakan 'politik tanpa politik' (*unpolitical politics*) lewat Khittah 26. Namun, karena nafsu politik elit NU besar, saat kebebasan politik terbuka pasca keruntuhan despotisme Soeharto, NU menjelma lagi dengan membidani lahirnya PKB, selain partai-artai kecil seperti PKU dan PNU.

Puncak keemasan sekaligus ketragisan adalah saat Abdurrahman Wahid naik sebagai Presiden ke-4 RI, sekaligus dilengserkan ramai-ramai. NU terluka, khususnya terhadap golongan modernisme Islam (Poros Tengah dan Golkar) dan kaum abangan-nasionalis (PDI-P). Bagi Azyumardi Azra, naiknya KH. Abdurrahman Wahid

menjadi Presiden justru merugikan NU sebab energi sejumlah elit NU terkuras untuk menyelamatkannya saat hendak dilengserkan.<sup>14</sup> Sementara R. William Liddle sepakat dengan Azyumardi Azra, bahwa KH. Abdurrahman Wahid tidak sepatutnya menerima konspirasi Poros Tengah dengan alasan kesehatan. Justru KH. Abdurrahman Wahid dibutuhkan negeri ini sebagai guru bangsa yang mengayomi seluruh anak bangsa dari fragmentasi dan konflik politik, tetapi KH. Abdurrahman Wahid justru melibatkan diri dalam politik praktis, mulai di PKB dan menjadi presiden dengan preesiden buruk baginya, juga bagi NU.<sup>15</sup>

Belajar dari semua itu, sebagai organisasi yang sangat besar dan berakar, NU masih tetap memiliki peluang yang sangat luas untuk melakukan proses revitalisasi dan reinventing dalam menata pola politiknya masa yang akan datang.

<sup>14</sup> Wawancara Azyumardi Azra Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 18 Agustus 2007.

<sup>15</sup> Wawancara William Liddle Guru Besar Ilmu Politik Indonesia pada Ohio University, di tengah-tengah acara ulang tahunnya ke-70 di kantor Freedom Institute, Jumat, 17 Januari 2008.

Kemampuan revitalisasi itu sangat bergantung kepada pola *political will* dan kepemimpinan yang akan dikembangkan oleh para pemimpin organisasi ini ke depan. Apabila pemimpin masa depan NU tetap menangani organisasi dengan model kepemimpinan yang sebagaimana para pendahulu mereka, maka sangat besar kemungkinan NU tidak akan mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Dengan begitu, NU bias mengurangi energi ke wilayah politik praktis. Kemudian menata *style* politik yang tidak lagi mereduksi jam'iyah. Artinya, NU tidak benar jika mengabaikan dunia politik sebab memiliki basis massa paling besar. Tapi ditata dalam mekanisme baru.

Basis politik yang harus dimainkan orang NU dengan caranya sendiri tanpa hanya menjadi mainan kelompok di luar NU. Selain itu, NU sebagai jam'iyah perlu menekankan perhatiannya kepada masalah-masalah sosial dan intelektual yang lebih berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Kerja-kerja rintisan dan pengembangan intelektualitas menjadi *trend* fenomenal pasca-Khittah itu. Lembaga-lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat mulai tumbuh di tubuh NU. Demikian pula, diskursus intelektual yang kreatif menjadi gejala cukup kuat di kalangan generasi muda NU yang mengusung wacana Post-Tradisionalis dalam *pakem* manhaj fikrahnya.<sup>16</sup>

Di atas semua itu, para pemimpin NU ke depan mengarahkan jam'iyah ini agar tidak mudah terseret ke dalam politik

kekuasaan, apalagi sampai menjadikan NU hanya media untuk meraih kekuasaan politik. Sebab masuknya mereka ke dunia politik semacam itu akan membawa implikasi yang sangat jauh. Masyarakat akar bawah, yang saat ini masih terbelakang, akan kian kehilangan sikap kritisnya dengan sekadar menjadi pendukung setia sang tokoh sebagaimana telah terjadi di masa lalu. Pola itu pada gilirannya hanya akan mengundang orang-orang untuk masuk ke jajaran kepengurusan dengan sekadar berambisi mencapai tujuan kepentingan yang sempit, sebagai loncatan untuk meraih kekuasaan dan sejenisnya, bukan untuk pengabdian yang tulus kepada masyarakat dan bangsa sebagai representasi NU.

Jika tidak diimbangi, fenomena itu tentu akan membuat pengembangan *civil society* dalam lingkungan NU akan terantuk ke dalam kesia-siaan. Akibatnya, warga NU akan menjadi obyek kepentingan dan korban yang kesekian kali sehingga mereka tidak pernah mengalami pencerahan dalam kehidupan mereka.

#### Bercermin Muktamar NU 2004

Pergolakan internal NU pasca pilpres dan muktamar NU 2004, maka Kiai Sahal Mahfudh yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi selaku Rais Aam, di jajaran struktural NU pasca Orde Baru, membangun komunikasi politik untuk menyatukan itikad penyelamatan NU. Kiai kharismatik itu ternyata memiliki kerisauan dan keprihatinan terhadap perkembangan di tubuh NU. Kesabaran

<sup>16</sup> Lebih sistematis uraian dialektika pemikiran kaum muda NU, lihat Rumadi, *Post-Tradisionalis Islam, Wacana Intelektualisme Komunitas NU*, (Cirebon: Fahmina, 2007).

Kiai Sahal Mahfudh seolah sudah habis ketika tiba-tiba dalam Muktamar Ke-31 Nahdlatul Ulama di Boyolali, menyoroti ulah sejumlah elit NU yang terlalu jauh meninggalkan Khittah NU dengan melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Menurut KH. Sahal Mahfudh, keterlibatan warga NU dalam politik praktis, baik sengaja maupun tidak sengaja, sering kali tidak lagi disertai dengan sikap kenegarawanan dan penguasaan yang memadai soal seluk-beluk politik, serta tidak memedulikan lagi garis-garis pedoman berpolitik yang sudah diputuskan oleh NU lewat muktamar ke-28 di Yogyakarta. Mereka bahkan kadang tidak lagi memedulikan Khittah NU serta kepentingan NU secara umum.<sup>17</sup> Akhirnya keterlibatan warga NU pada politik praktis lebih banyak menghabiskan energi dan menyebabkan kerenggangan di antara sesama warga NU sendiri. Sementara khidmah-khidmah yang sangat dibutuhkan umat justru banyak yang terbengkalai.

Ini semua berimbas pada tidak sehatnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tercatat pernyataan resmi itu merupakan statemen paling keras yang pernah

dilontarkan Sahal yang dikenal kalem, seperti halnya karakter almarhum KH. Ilyas Rukhiyat, mantan Rois Syuriah PBNU yang lebih banyak diam, menahan diri, dan tidak terlibat dalam perbedaan sikap di kalangan ulama dan elit NU.

Meskipun dalam rekomendasi Muktamar Ke-30 NU di Lirboyo, PBNU meminta warganya menyalurkan aspirasi politiknya kepada PKB, bukanlah suatu kesalahan. Tapi rekomendasi itu berisi kebebasan warga NU menyalurkan aspirasi politiknya ke partai mana saja. Namun, memang warga NU diminta mempertimbangkan PKB sebagai partai yang kelahirannya difasilitasi NU. Jadi kira-kira melepas kepalanya, tapi ekornya dipegang. Sebagai sebuah pengalaman, kan tidak salah. Sebab itu kan juga merupakan momentum untuk pendidikan politik bagi warga NU.

Sementara keterlibatan Kiai Hasyim Muzadi yang menjadi calon wakil presiden setelah menyatakan cuti dari posisi Ketua umum PBNU, maka NU secara kelembagaan tidak pernah merekomendasinya sebagai calon wakil presiden. Ketika dia diminta menjadi calon wapres, jajaran pengurus PBNU rapat gabungan syuriah, tanfidziyah, dan mustasyar. Dalam perte-

<sup>17</sup> Pernyataan KH Sahal Mahfudh, yang dalam Muktamar NU di Boyolali terpilih lagi secara aklamasi sebagai Rois Aam Syuriah PBNU periode 2004-2009 mengindikasikan bahwa dirinya menghendaki NU tidak boleh berpolitik praktis. Alasannya, sesuai khittahnya, NU harus memfokuskan diri hanya pada politik kebangsaan, yaitu menjaga keutuhan NKRI dan politik kerakyatan untuk membela rakyat. Bukan memfokuskan diri pada politik kekuasaan atau politik praktis. Tapi jangan salah, NU tidak pernah melarang warganya berpolitik.

Terjun dalam kegiatan politik praktis adalah hak setiap warga negara. Tapi ada aturan-aturan, etika, dan pedoman yang harus dipegang. Misalnya, tidak boleh membawa-bawa, apalagi mengatasnamakan institusi. Sayangnya, kekurangpahaman warga terhadap khittah atau tidak konsistennya mereka terhadap pedoman berpolitik NU membuat mereka sering melibatkan NU sebagai institusi dan mengorbankan kepentingan lebih besar. Lihat pernyataan KH. Sahal Mahfudh di *Harian Kompas* 29 September 2004

muan tersebut, komunikasi politik sejumlah elit NU yang terlibat dalam perdebatan keras dan hasilnya berujung pada macetnya komunikasi politik elit. Sehingga rapat lalu menyerahkan keputusan kepada hak prerogatif kepada KH. Sahal Mahfudh selaku Rais Aam Syuriah.

Atas kebijakannya, secara diplomatis ia menyerahkan kepada yang bersangkutan. Artinya, kalau Kiai Hasyim maju, maka tidak mewakili PBNU, tidak mewakili lembaga. Pola komunikasi politik Kiai Sahal ini mencerminkan fleksibilitas politik yang dianut oleh elit NU. Kiai Sahal hanya menegaskan bahwa kesediaan Kiai Hasyim Muzadi semata-mata atas haknya sebagai warga negara. Bukan karena dia menjabat Ketua Umum Tanfidziyah, maka dia kemudian menyatakan non-aktif dari jabatannya di PBNU, sampai proses pemilihan presiden berakhir.

Komunikasi politik elit NU di jajaran jam'iyah (warga), berbeda dengan tafsiran elit NU yang memiliki kepentingan politik di partai. Sejumlah elit politik NU yang aktif di PKB mengartikan sikap Kiai Sahal dan jajaran PBNU memberi endorsement bagi Kiai Hasyim untuk berpolitik praktis. Untuk itu, Kiai Sahal merespon sikap elit politik NU di PKB yang tidak terima. Para elit NU di PKB mengharapkan PBNU secara resmi merekomendasi tokoh NU sebagai calon presiden dari NU. Namun Kiai Sahal menolak dan kembali menegaskan hal itu dalam Muktamar ke-31 di Solo, akhir 2004.

Berangkat dari pengalaman itu, Kiai Sahal dalam muktamar tersebut, minta agar aturan tentang kegiatan politik praktis dibuat secara detail dan rinci. Harapannya, tidak terjadi kebuntuan dalam



komunikasi politik antar elit NU dengan adanya multitafsir terhadap sikap elit NU lainnya, terutama yang berada pada kepengurusan PBNU. Dalam hal ini Kiai Sahal minta dihapuskannya rekomendasi Muktamar Lirboyo tentang PKB. Lantas dibuat aturan yang jelas, rinci, dan ketat soal keterlibatan pengurus NU dalam politik praktis.

Bagi Kiai Sahal, sudah saatnya organisasi NU menyapah warga NU dalam berpolitik praktis. Ini semacam upaya agar tidak terjadi praktik yang membawa-bawa institusi NU untuk kepentingan politik praktis, dan agar tidak terjadi lagi tarik-menarik kepentingan serta perselisihan selama muktamar.

Muktamar NU ke-31 di Solo, akhir tahun 2004, mungkin, merupakan muktamar terpanas sepanjang sejarah NU. Sebab perbenturan dan konflik internal sangat dominan, bahkan berlanjut pasca muktamar. Adalah kubu Kiai Abdurrah-

man Wahid dan Kiai Hasyim Muzadi berada kekuatan untuk meraih posisi tertinggi di organisasi ulama tersebut. Kiai Sahal Mahfudh kemudian tampil sebagai pahlawan penyelamat khittah. Sejak terpilihnya untuk kedua kali sebagai Rais Aam Syuriah PBNU memang bukan posisi enak bagi Kiai Sahal yang mengharuskan dirinya menjadi komunikator politik di tengah konflik internal NU dengan mengeluarkan 'resolusi' kontrak jam'iyah kepada masing-masing kandidat ketua tanfidziyah PBNU.

Intinya, Kiai Sahal meminta kesediaan masing-masing pihak yang berseteruh agar menghindari politik praktis dan menguatkan komitmen untuk menyelamatkan sekaligus mengurus NU secara total. Hal itu dilakukannya, menjelang pemilihan pimpinan PBNU dalam muktamar 2004 di Solo, pertentangan para ulama dan pengurus PBNU yang mendukung pencalonan kembali Kiai Hasyim dengan kiai dan pengurus NU yang mendukung kubu Kiai Abdurrahman. Bahkan dibanding muktamar di Cipasung 15 tahun lalu, ketika ada intervensi rezim Soeharto terhadap NU, pertentangan yang terjadi dalam muktamar di Boyolali kemarin terasa lebih keras. Kedua kubu sama-sama melibatkan para kiai sepuh.

Dalam memainkan perannya sebagai komunikator politik NU, Kiai Sahal menghindari jika NU ditarik ke politik lagi. Maka Kiai Sahal membuat kontrak jam'iyah dengan para calon ketua PBNU. Isinya komitmen agar mereka tidak terlibat kegiatan politik apa pun, tidak mencalonkan diri untuk jabatan politik praktis apa pun, di legislatif maupun eksekutif. Upaya itu dilakukan dapat meng-

hentikan tarikan-tarikan politik terhadap NU yang potensial untuk membawa NU ke dalam pusaran pertarungan politik. Perbedaan yang fitri dan merupakan kelaziman di alam demokrasi, tidak boleh meruncing menjadi perselisihan, apalagi permusuhan. Jika Khittah NU tidak secara konsisten diamalkan, kita menjadi sangat rentan terhadap pengaruh luar yang tidak menguntungkan. Mengingat pengalaman NU yang sepanjang sejarah tidak henti-hentinya mendapat cobaan, saya mengajak warga NU melakukan pembenahan untuk mengoptimalkan khidmah pelayanan NU bagi bangsa.

Penulis melihat, kendala internal organisasi yang dihadapi NU adalah. *Pertama*, besarnya massa Nahdliyyin belum tentu akan diterjemahkan langsung pada kesetiaan politik kepada parpol yang didirikan NU. Hal ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan munculnya generasi baru NU selama tiga puluh tahun terakhir yang semakin kritis terhadap pilihan-pilihan politik.

*Kedua*, mengenai sumber daya manusia dan pengalaman organisasi. Setidaknya, keterlibatan sebagian politisi NU di dalam format politik Orde Baru yang sarat dengan kooptasi dan hegemoni itu telah membuat sebagian mereka tidak lebih dari politisi yang berkualitas rendah. Baik mereka yang ada di PPP, PDI, dan Golkar pada umumnya telah gagal menjadi saluran kepentingan kaum nahdliyyin, dan lebih merupakan pemain politik yang hanya mementingkan diri sendiri. Kualitas politisi NU seharusnya juga menjadi perhatian utama, dan karenanya, diperlukan proses selektif dan verifikasi yang memadai sebelum mereka tampil

sebagai pembela dan pembawa bendera NU. Rendahnya kualitas politisi itu, akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kontribusi mereka pada perjuangan menegakkan kebenaran.

Pergulatan para elit NU yang telah meningkatkan intensitas komunikasi di kalangan komunitas itu memiliki makna universal, yakni segala bentuk komunikasi yang bermuatan pesan, respons, sikap dan keputusan politik. Komunikasi politik NU dalam konteks ini tidak didefinisikan sebagai kegiatan perebutan kekuasaan atau pemilihan pimpinan negara dan urusan pemerintahan, melainkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memelihara keputusan-keputusan politik agar tetap selaras dengan kebutuhan dan aspirasi politik kaum Nahdiyyin.

Selain dari itu, harus ditegaskan pula bahwa partisipasi politik kaum Nahdiyyin di sini, adalah berada dalam bingkai konsep dasar yang meliputi aktivitas atau aksi warga negara biasa untuk meraih posisi dan pengaruh politik. Memaknai partisipasi warga NU dalam bidang politik praktis sebagai pertanda kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi, maka warga NU dapat digolongkan sebagai bagian masyarakat yang demokratis.

Tepatnya, perubahan komunikasi politik elit NU pasca Orde Baru tidak selalu sinergis dengan perubahan perilaku dan partisipasi politik Nahdiyyin dari *emotional choice* menjadi *rational choice*. Rasionalitas pilihan politik Nahdiyyin pasca Orde Baru tidak terlepas dari akses informasi dari media massa dan meningkatnya kesadaran politik warga masyarakat secara umum, tidak terkecuali

warga NU. Kasus kekalahan PKB di kantong utama NU adalah bukti konkrit.

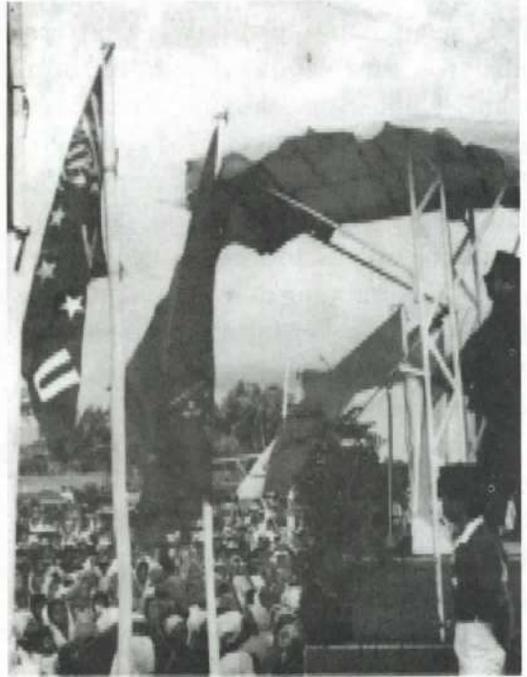
### Mekanisme Baru: Sebuah Tawaran

Turbulensi politik NU diakibatkan terjadinya fragmentasi dari konflik antar tokoh NU sendiri. Mengurai realitas dan pengalaman politik NU, selalu diwarnai konflik. Konflik internal PKB antara kubu Gus Dur—*allahu yarhamu*— dan Muhaimin Iskandar, mengundang perhatian sekaligus keprihatinan. Terlalu sulit bagi publik untuk memahami logika politik Gus Dur yang memecat Muhaimin Iskandar dari posisi Ketua Umum PKB, di saat partai berbintang sembilan ini seharusnya berkonsolidasi menghadapi Pemilu 2009.

Demikian halnya dengan sikap Muhaimin Iskandar yang secara terang-terangan melawan Gus Dur yang demikian berjasa membesarkannya. Konflik kedua kubu ini kian berkepanjangan pasca keputusan Mahkamah Agung memenangkan atas Kasasi kubu Muhaimin Iskandar. Meski demikian, Gus Dur dengan tegas menolak islah.

Mengamati kian rumitnya permasalahan partai berbasis Nahdiyyin ini, sejumlah pihak menaruh harapan sikap melunak antara kedua kubu tersebut, demi menyelamatkan PKB dari keterpurukan menjelang Pemilu 2009. Berharap Gus Dur melunak sangat tipis, maka etikanya dalam tradisi NU, Muhaimin dapat bersikap terbuka dan siap bekerjasama dengan kubu Gus Dur. Jika langkah itu benar-benar dilakukan hingga *sowan* kepada Gus Dur, tentulah sedikit menyelamatkan citra PKB ke depan.

Siapa dalang konflik PKB sesungguhnya



guhnya, tentulah Gus Dur yang 'dieksekusi' publik sebagai tokoh determinannya. Tapi bagi pendukung Gus Dur, opini demikian tidak dapat dibenarkan, melainkan akan menuduh keterlibatan pihak ketiga, pemerintah, misalnya. Terlepas dari berbagai spekulasi yang ada, sulit diingkari bahwa PKB tidak terlepas dari bayang-bayang Gus Dur selaku deklaratornya. Lalu apakah Guru Gus Dur 'diadili' atas perilaku politiknya yang otoriter. Bukankah Gus Dur dikenal sebagai ikon penegakan demokrasi?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara normatif, sebab ia adalah figur yang memiliki banyak makna, berbeda dengan logika masyarakat secara umum. Bagi yang memahami nalar politik Gus Dur, dengan gampangya berkilah, ia adalah tokoh yang memiliki telenta dan 'terawang' politik, sehingga langkahnya yang dinilai keliru hari ini, justru dapat

dibenarkan pada masa mendatang.

Namun, persoalan konflik PKB sekarang ini, bukan lagi berwacana ihwal Gus Dur sebagai tokoh kharismatik yang setiap langkahnya dibenarkan dan diterima atau sebaliknya. Di luar itu, persoalan yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan nasib PKB dari keterpurukan citra dan perolehan suaranya pada setiap hajatan politik, pasca wafatnya Gus Dur.

Determinasi Gus Dur dalam PKB dapat bernilai positif selama partai dijalaninya di atas khittahnya, menyalurkan aspirasi politik kaum Nahdliyin. Sebagai kaum mayoritas, jelas kaum Nahdliyin sebagian besar petani dengan standar ekonomi relatif rendah. Maka konflik internal PKB yang merupakan partai yang didirikan tokoh NU itu tidak dapat memenuhi harapan Nahdliyin untuk perbaikan nasibnya.

Fragmentasi elit NU politik di tubuh PKB membuatnya abai terhadap kemaslahatan kaum Nahdliyin. Implikasinya, suara Nahdliyin bisa eksodus ke partai lain akibat krisis kepercayaan pada elit politik NU di PKB. Tentunya, tidak semua konstituen PKB adalah warga NU, demikian juga sebaliknya. Namun, PKB menjadi representasi partai yang diimpikan dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan Nahdliyin yang sering dimarginalkan sepanjang Orde Lama dan Orde Baru.

Itikad elit PKB yang sepanjang berdirinya acapkali dilanda konflik internal itu islah menjadi asa yang beralasan. Kesadaran membangun kebersamaan untuk kemaslahatan konstituen NU menjadi keharusan, elit NU di PKB sejatinya membangun konsensus yang mencerminkan kesantunan dan etika politik secara kolektif.

\*\*\*

NU memiliki khazanah tradisi yang kuat dan mengakar. Tradisi pesantren yang terbangun secara emosional antar-kiai dalam jaringan geneologis, tetap terpelihara baik. Ikatan ideologis keaswajaan dan sentimen keagamaan yang kuat melalui jaringan tradisi pesantren, menumbuhkan intelektualisme kaum santri. Tradisi lain yang juga menjadi karakteristik kaum Nahdliyin adalah perhargaannya terhadap ulama. Kepatuhan dan kesantunan santri pada hakikatnya adalah modal untuk membangun soliditas, asal tidak diselewangkan.

Namun yang memperhatikan kemudian, pengalaman dan pengamalan etika tersebut hampir hilang dalam konstelasi politik. Perilaku politik elit NU yang saling bertikai akan menjatuhkan

wibawanya. Pendiri NU tidak mewariskan tradisi politik yang melahirkan perpecahan, tapi tradisi politik moral kebangsaan untuk kemaslahatan anak bangsa.

Terlepas intrik dan substansi persoalan politik di kalangan elit NU di PKB, serta bukan pada tempatnya memvonis siapa yang bersalah. Nyata, konflik internal PKB sedikitpun tidak mencerminkan etika dan kesantunan santri-kiai itu, bukanlah tradisi NU. Atau hendak membuat tradisi politik NU yang disesaki konflik. NU dan PKB harus sinergis, NU mengurus jama'ah dalam bidang sosial keagamaan. Sementara PKB mewedahi aspirasi politik Nahdliyin. Betapa indahny bila elit politik NU di PKB tetap mengedepankan kesantunan dan keteladanan politik serta istiqamah merawat tradisi NU.

### Akhirul Kalam

Belajar dari rangkaian pengalaman politik NU pasca Orde Baru, maka penulis mengajukan tawaran untuk diagendakan dalam Mukttamar NU Ke-32 di Makassar, yaitu menyangkut perkara politik.

*Pertama*, menata politik NU dengan mekanisme yang mengatur alur politik mengingat NU memiliki basis massa riil sebagai potensi politik menjanjikan, maka perlu dikelola sendiri berupa *manhaj siyash*, tidak digarap orang lain. Tetapi bukan berarti mempolitisasi NU. Pengelolaan suara Nahdliyin tidak melalui pendekatan sentimen jam'iyah, tapi tawaran agenda perbaikan bagi warga Nahdliyin secara riil. Karenaya perlu pemetaan politik NU. *Kedua*, melakukan pendidikan politik, sebab problem selama



ini dihadapi NU, justru karena kaum Nahdliyin tidak memiliki pemahaman politik secara benar sesuai agenda politik NU. *Ketiga*, mempersiapkan kaderisasi NU untuk dunia politik tanpa harus melibatkan tokoh-tokoh yang selama ini bergulat di pesantren, sebab merekalah benteng terakhir NU. Sayap kultural yang harus memainkan peran tersebut, NU secara struktural hanya memberi seruan moral politik untuk membela kepentingan politik NU dalam kancah politik praktis sehingga NU sebagai jam'iyah tetap steril dengan memperkuat kontrak jam'iyah.

Tawaran ini setidaknya sebagai ikhtiar melakukan sterilisasi di tengah arus fragmentasi dan turbulensi politik yang merugikan NU. Proses *reinventing* politik NU menjadi keniscayaan, bagaimana me-

nata mekanisme politiknya, menjabarkan prinsip *take and give* bagi kemaslahatan NU.

*Mabadi khoiro ummah* yang canggih itu, harus digerakkan guna mengawal perjalanan organisasi, dan proses demokratisasi yang sedang berlangsung di negeri ini, Indonesia tercinta. Konsep NKRI yang dimiliki NU musti diwujudkan dalam praktik-praktik politik sehari-hari.

Dengan begitu, NU tidak berkutat pada politik praktis yang parsial, dan dapat meminimalisir fragmentasi. Harapan ke depan, energi NU, intelektualisme NU, moderatisme NU, sikap silidaritas berpuluh-puluh juta warga NU, dapat disumbangkan untuk negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga!